

Dampak strategi pengendalian bencana abrasi di pantai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Nasiah Badwi¹, Ichsan Invanni Baharuddin², Ibrahim Abbas³
^{1,2,3}Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar

Abstract. The end of end of this disaster become a popular issue abrasion due to impact on regional development. Research objectives, namely: 1) know the attitude of the Government and the community in disaster control abrasion. 2) know the attitude of the society towards a model of disaster control abrasion socialized, 3) Determine a strategy for controlling disaster of abrasion on the coast of Maros. The location of the research is on the coast of Celebes Maros. Maros there are 4 Subdistrict on the beach. Of the four sub socialisation model disaster control abrasion. Socializing is done directly to the public, and the samples are purposive each subdistrict. This is done because there is a problem between the communities by government regulations related to the prohibition of cutting down mangrove tanpa earlier socialization. The results showed that: 1) the attitude of the Government quite well against natural disasters because the Agency has made disaster relief areas, and also has made rules of disaster mitigation, especially each disaster. The weakness of the Government's attitude is socializing less directly, only done representation of local authorities. But the attitude of the society towards the disaster still low abrasion, due to expansion of land farmed by converting mangrove forests. 2) attitudes towards disaster mitigation are socialized is high enough because of all the willing to carry out if there is a government program. 3) disaster control strategies i.e. abrasion with community empowerment with the extension and training to enhance the knowledge of the importance of disaster mitigation, the Government and society in cooperation.

Keywords: abrasion hazard mitigation, community empowerment

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.508 buah pulau yang dihubungkan oleh selat dan laut, serta memiliki garis pantai sepanjang 81.000 (Koddeng, 2011). Kurang lebih 75 % kota di Indonesia terletak di pantai dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Hal tersebut menyebabkan wilayah pantai berkembang dengan pesat untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia diantaranya; permukiman penduduk, pelabuhan, kawasan industri, perikanan, pertanian, dan kawasan wisata (Nasiah & Suprpta, 2010). Hal itu menandakan pantai dan lautan mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Akibatnya wilayah pantai di Indonesia banyak mengalami masalah seperti erosi, abrasi, sedimentasi, maupun intrusi air asin.

Pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem hidup yang saling terkait satu sama lain. Kedinamisan kawasan pantai yang terjadi secara terus menerus salah satu wujudnya yaitu perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai yang terjadi berupa pengikisan badan pantai (abrasi) dan penambahan badan pantai (sedimentasi). Abrasi pantai akhir-akhir ini menjadi perbincangan para akademisi dan pemerintah karena garis pantai mengalami pergeseran atau terkikis sehingga akan berdampak pada ekosistem di dalamnya dan keberlangsungan pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan dan lebih jauh berdampak menimbulkan konflik antardaerah atau bahkan antar-negara (Adhitya, 2012). Adapun yang mempengaruhi

terjadinya abrasi dan sedimentasi di pantai adalah faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami yang mempengaruhi terkikisnya pantai yaitu; gelombang, arus, dan pasut. Umumnya faktor alami berlangsung lama, tapi dengan adanya faktor non-alami menjadi pemicu (Adhitya, 2012).

Pada Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar kabupaten mengalami sedimentasi sepanjang 20.443 km (64,65%), dan yang terabrasi hanya 70,59 km (18,98 %) yang tersebar di Akkarena Kota Makassar, Langga Kabupaten Pinrang, Pantai Saro dan Topejawa Kabupaten Takalar (Nasiah dan Suprpta, 2010). Secara umum pantai Kabupaten Maros kategori sedimentasi, namun ada wilayah yang mengalami abrasi, seperti Pantai Kuri Lompo dan Kuri Caddi, serta pantai Bontobahari.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu diadakan penelitian yaitu; 1) Mengetahui sikap pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan bencana abrasi di wilayah tempatnya, 2) Mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem pengendalian bencana abrasi yang disosialisasikan, dan 3) Menentukan strategi pengendalian bencana abrasi yang selalu mengancam setiap saat di wilayah tempat tinggalnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pantai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan sikap pemerintah dan

masyarakat terhadap abrasi dan model penanggulangannya, serta strategi penanggulangan bencana abrasi yang cocok di wilayah pantai Kabupaten Maros. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari hasil observasi (pengamatan dan pengukuran), dan informan dari responden.

Populasi atau sasaran dalam penelitian ini adalah staf pemerintah dan seluruh masyarakat yang berada di wilayah pantai utamanya yang rawan bencana abrasi. Penentuan titik sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Dilakukan sosialisasi di setiap kecamatan yang berada di wilayah pantai. Pada setiap titik sampel dilakukan pengukuran, pengamatan, dan wawancara dengan masyarakat. Dengan cara ini diharapkan dapat representatif sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan data yang diperlukan meliputi: 1) Teknik observasi (pengamatan dan pengukuran). Pengumpulan data berupa pengamatan dan pengukuran secara langsung di lapangan sikap masyarakat terhadap bencana dan model penanggulangan bencana abrasi dan perilaku masyarakat yang bermukim di wilayah yang rawan abrasi. 2) Teknik dokumentasi yaitu teknik ini sangat penting untuk melengkapi data, dalam rangka analisis masalah penelitian. 3) Teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden dan informan penelitian untuk mengetahui sikap masyarakat dan pemerintah terhadap bencana dan model penanggulangan bencana abrasi di wilayahnya. Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dan disusun menjadi tabel frekuensi. Selanjutnya digunakan untuk menjelaskan suatu gejala dan menarik kesimpulan yang logis.

Untuk menentukan strategi pengendalian bencana abrasi di wilayah pantai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada analisis SWOT. Pada analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Treats*). Pada faktor-faktor yang berpengaruh baik dari internal maupun dari eksternal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1) Sikap masyarakat dan pemerintah

Sikap pemerintah terhadap bencana alam cukup tinggi karena sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Kabupaten Maros. Terkhusus pada bencana abrasi sudah dibuat aturan pemanfaatan lahan dengan tetap melestarikan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi. Namun sikap

tersebut perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan aturan kepada masyarakat. Dan yang sangat penting adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan dan pelatihan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat pentingnya penanggulangan bencana abrasi.

Sikap masyarakat pantai kabupaten Maros terhadap bencana abrasi di wilayahnya cukup rendah karena hanya 8 atau 20 persen yang punya usaha untuk mengatasi abrasi jika terjadi abrasi di wilayahnya. Rendahnya sikap masyarakat tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang abrasi dan dampak abrasi bagi kehidupan mereka karena masih kurang yang mengalami abrasi. Hal itu disebabkan karena sebagian besar pantai kabupaten Maros tertutup mangrove yang merupakan hasil dari orang dulu. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya memitigasi abrasi.

2) Sikap masyarakat terhadap model pengendalian bencana yang disosialisasikan

Sikap masyarakat terhadap model pengendalian abrasi yang disosialisasikan cukup tinggi, karena semua responden bersedia terlibat jika ada upaya pengendalian abrasi. Namun beda-beda bentuk usahanya untuk mengatasi abrasi. Kelihatannya bentuk usaha keterlibatan tergantung pada kepentingan jika memiliki tambak maka kesiapan untuk terlibat tinggi. Selain itu juga faktor ekonomi. Sikap masyarakat terhadap model penanggulangan bencana abrasi yang disosialisasikan ditentukan beberapa faktor terutama faktor kepentingan.

3) Strategi pengendalian bencana abrasi di pantai Kabupaten Maros

Faktor internal yang meliputi:

a) *Strengths* (Kekuatan)

- Kondisi fisik (tipologi pantai) yang cukup layak untuk tumbuh dan berkembangnya tumbuhan mangrove.
- Ketersediaan bibit mangrove dan lahan kosong untuk penanaman mangrove.
- Potensi ikan, udang, dan kepiting sebagai tempat berkembang biak di kawasan mangrove.
- Dukungan masyarakat setempat dalam kegiatan pelestarian tanaman mangrove.

b) *Weakness* (Kelemahan)

- Kurangnya pengawasan terhadap pertumbuhan mangrove.
- Sebagian masyarakat kurang peduli terhadap pentingnya keberadaan hutan mangrove.
- Belum adanya aturan dan sanksi pada masyarakat yang merusak hutan mangrove.

Faktor eksternal yang meliputi:

a) *Opportunities* (Peluang)

- Kebijakan pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove untuk mencegah abrasi pantai.
- Adanya LSM atau kelompok petani dalam ikut serta dalam pelestarian hutan mangrove.
- Ketersediaan masyarakat pesisir dengan pengadaan peraturan dan kebijakan dalam pelestarian hutan mangrove.

b) *Threats* (Ancaman)

- Konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove.
- Rasa kepemilikan lahan mangrove.
- Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak.

B. Pembahasan

Berdasarkan sikap masyarakat yang kurang peduli pada bencana abrasi, disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang abrasi dan dampaknya. Untuk mengatasi hal itu diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana abrasi (Julius, 2016).

Berdasarkan sikap pemerintah cukup tinggi dengan adanya badan penanggulangan bencana dan aturan pemanfaatan hutan mangrove, namun lemah karena kurang sosialisasi. Hal itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan sanksi jika ada pelanggaran.

Berdasarkan analisis yang mempertimbangkan kepentingan faktor-faktor eksternal dan internal serta keterkaitan antar faktor-faktornya (analisis SWOT), maka diperoleh alternatif strategi pelestarian sumber daya hutan mangrove di Kabupaten Maros, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi pemerintah, dan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove.
- 2) Melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan kosong untuk pengelolaan kawasan hutan mangrove.
- 3) Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam membentuk institusi dalam pelestarian hutan mangrove.
- 4) Meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, serta LSM dalam pembentukan badan pengawasan terhadap hutan mangrove.
- 5) Membuat dan menerapkan peraturan mengenai sanksi bagi oknum yang melakukan pengerusakan terhadap hutan mangrove.
- 6) Pengadaan penyuluhan dan/atau himbauan tentang pentingnya keberadaan hutan mangrove.
- 7) Mengimbau dan mengajak masyarakat menanam mangrove di sebagian wilayah tambak.
- 8) Mengadakan sistem pemantauan terhadap peraturan pemerintah tentang larangan pengerusakan ekosistem mangrove.

- 9) Meningkatkan pengawasan terhadap hutan mangrove untuk menghindari oknum yang melakukan tindakan pengerusakan kawasan hutan mangrove.
- 10) Penegasan peraturan dan sanksi pelanggaran dalam tindakan yang dapat merusak hutan mangrove.
- 11) Memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menyadari pentingnya keberadaan hutan mangrove dengan memanfaatkan lahan yang ada.

Berdasarkan alternatif strategi diatas, diperoleh prioritas utama dalam pelestarian sumber daya hutan mangrove di Kabupaten Maros, yaitu:

- 1) Membuat rekomendasi tentang kondisi fisik (tipologi) pantai material lumpur yang cocok dikembangkan dan dijadikan wilayah pelestarian hutan mangrove (Gunarto, 2004).
- 2) Model yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat (Maulana et al., 2016).
- 3) Kolaborasi LSM atau kelompok tani dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan ketersediaan bibit ada.
- 4) Membuat aturan dan sanksi pelanggaran tindakan merusak hutan mangrove dan penangkapan ikan, udang, dan kepiting yang menggunakan peralatan tidak ramah lingkungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan yaitu sikap pemerintah terhadap bencana cukup baik karena sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sikap masyarakat terhadap bencana abrasi masih rendah karena hanya 20% yang ada upaya jika terjadi abrasi. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang abrasi. Sikap masyarakat terhadap model pengendalian bencana abrasi yang disosialisasikan cukup tinggi. Strategi pengendalian bencana abrasi di pantai Kabupaten Maros yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dan diselesaikan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto, 2004. Mangrove Conservation as support fishing resources in coastal area. *Jurnal Litbang Pertanian*, 23 (1). 2004.
- Julius, M. 2016. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Bahaya Abrasi di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Jurnal Kepemimpinan dan Perguruan Sekolah*. Vol 1. No.2 Thn 2016. Padang.
- Koddeng, Baharuddin. 2011. Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Barombong dan Celebes Convention Centre). *Makalah Prosiding*. Vol. 5. Desember ISB 978-979-127255-0-6
- Maulana, Edwin, heresia Retno Wulan, Dwi Sri Wahyuningsih, Wayan Wisnu Yoga Mahendra, Etik Siswanyi. 2016. Strategi Pengurangan Risiko Abrasi di Pesisir Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016*. ISBN: 978-602-361-044-0
- Nasiah dan Suprpta, 2010. Zonasi Rawan Bencana Marin di Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Geografi*. Volume 3 No. 1 Januari 2010. Departement Geografi FMIPA UI. Depok.